

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI DAN BADAN DI KPP PRATAMA
PALEMBANG SEBERANG ULU**

SKRIPSI



NAMA : YUYUN
NIM : 22 2010 297

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2014

**PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(ORANG PRIBADI DAN BADAN) DI KPP PRATAMA
PALEMBANG SEBERANG ULU**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**NAMA : YUYUN
NIM : 22 2010 297**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2011**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuyun

Nim : 22 2010 297

Program studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Mei 2014

Penulis,


(Yuyun)

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan
Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP
Pratama Palembang Seberang Ulu

Nama : YUYUN
Nim : 22 2010 297
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal,..... 2014
Pembimbing,



Hasyim H. S.E. M.Si.
NIDN : 0012036101

Mengetahui,
Dekan
u.b. Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali S.E., Ak. M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021960

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ *Berusaha, berdoa, semangat, optimis, pasti bisa.*
- ❖ *"Jangan pernah ada kata menyerah, sebelum kita mencapai suatu kemenangan".*
- ❖ *Bermimpi, percaya lalu yakin.*
- ❖ *Pantang menyerah sebelum berhasil.*
- ❖ *Orang tua ku adalah harapan ku*

(Penulis)

Terucap syukur kepada allah swt.

Skripsi ini

Ku Persembahkan kepada :

- ❖ *Ayah dan Ibu*
- ❖ *Saudara-saudara Ku*
- ❖ *Seseorang yang akan menjadi pendamping ku kelak*
- ❖ *Pembimbing skripsi ku*
- ❖ *Almamater ku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa terucap atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmatnya. Terutama nikmat islam, iman, kesehatan beserta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak peneghasilan Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Bastomi dan Ibunda Ningsi serta Ayukku Nentih dan Adikku Megis saputra dan Mega Aboti serta seseorang yang mencintaiku dan tidak henti-hentinya memberikan do'a, pengertian, petunjuk, dorongan dan materi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hasyim.H., SE. MS.i. Selaku pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini yang telah sabar membimbing, memberikan nasehat dan memberikan masukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Selain itu juga, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak H.DR.M. Idris, S.E. M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Abid Djazuli, S.E. MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Bellywati Kosim S.E M.Si selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosalina Ghazali, S.E Ak. M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Welly, S.E. M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pimpinan dan Staf pegawai Kantor Peleyanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan riset dan memberikan data dalm penelitian ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu guna mencerdaskan anak didiknya, sehingga terbentuknya mahasiswa yang unggul dan islami.
9. Kepada Ayahanda Bastomi dan Ibunda Ningsi yang telah memberikan do'a, membiayai, membesarkan, mendidik, dukungan dan Motivasi .
10. Kepada saudara-saudaraku tercinta Ayuk Nentih dan Adikku Megis Saputra dan Mega Aboti).

11. Kepada Keluarga Besarku, teman-teman paket CA.02.2010 serta Teman-teman angkatan Akuntansi dan Manajemen 2010.
12. Seseorang yang ada hatiku mendampingiku memberikan warna dalam perjalanan skripsiku.
13. Kakak dan Adik-Adikku IMM dan BEM Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
14. Pimpinan beserta Staf Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Mei 2014

Yuyun

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRAKATA.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRECT	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	8
B. Landasan Teori	10
1. Pajak.....	10

a. Pengertian pajak	10
b. Fungsi Pajak.....	10
c. Jenis-jenis pajak	11
2. Pajak Penghasilan	12
a. Pengertian pajak Penghasilan	12
b. Subjek Pajak Penghasilan	12
c. Objek Pajak Penghasilan	15
3. Wajib Pajak	16
a. Pengertian Wajib Pajak	16
b. Jenis-Jenis Wajib Pajak.....	16
c. Kewajiban Wajib Pajak.....	17
4. Kepatuhan Wajib Pajak	21
a. Kepatuhan Formal.....	21
b. Kepatuhan Material	21
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	23
a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak	23
b. Fungsi NPWP	24
6. Surat Pemberitahuan.....	24
a. Pengertian Surat Pemberitahuan.....	24
b. Fungsi Surat Pemberitahuan.....	25
7. Hubungan Antar Variabel	25
a. Hubungan Wajib Pajak Dengan Penerimaan Pajak.....	25

b. hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak.....	27
C. Hipotesis.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Tempat Penelitian	30
C. Operasionalisasi Variabel.....	30
D. Data yang Diperlukan	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data dan Teknis Analisis	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	39
1. Gambaran umum kantor pelayanan pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	39
2. Deskripsi Variabel.....	44
a. Jumlah Wajib pajak	44
b. Kepatuhan wajib pajak.....	45
c. Penerimaan pajak penghasilan	46
3. Hasil Uji Data.....	47
a. Uji Normalitas Data	47
b. Uji Asumsi Klasik.....	49

1) Uji Multikolinearitas	50
2) Uji Autokorelasi.....	51
3) Uji Heteroskedastisitas.....	51
c. Uji Regresi Linear Berganda.....	53
d. Uji Hipotesis.....	59
1) Uji F	59
2) Uji t.....	63
B. Pembahasan	57
1. Analisis Uji F.....	57
2. Analisis Uji t.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

	Halaman
Tabel I. I Jumlah wajib dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.....	5
Tabel I. I Jumlah wajib dan penerimaan pajak penghasilan badan.....	5
Tabel II. 1 Penelitian sebelumnya.....	8
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel.....	30
Tabel IV.1 Jumlah wajib orang pribadi dan badan	45
Tabel IV.2 Jumlah penerimaan (lembar) Surat pemberitahuan (SPT)	46
Tabel IV.3 Jumlah penerimaan pajak penghasilan.....	47
Tabel IV.4 Hasil Uji Normalitas Data	48
Tabel IV.5 Hasil pengujian multikoloneritas.....	49
Tabel IV. 6 Hasil Pengujian Autokorelasi	50
Tabel IV.7 Hasil Pengujian Regrasi Liner pengaruh terhadap orang pribadi	53
Tabel IV.8 Hasil Pengujian Regrasi Liner pengaruh terhadap badan	56
Tabel IV.8 Hasil Uji F	59
Tabel IV.9 Hasil Uji t	63
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	42
Gambar IV.2 Grafik	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Selesai Riset
- Lampiran 2 : Data Penelitian
- Lampiran 3 : Hasil Pengujian SPSS
- Lampiran 4 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Quran (Surat Pendek)
- Lampiran 5 : Biodata Penulis
- Lampiran 6 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi

ABSTRAK

Yuyun/2220297.P/2014/Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu/Perpajakan

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak secara silmutan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan badan) di kantor KPP pratama Palembang seberang ulu? dan Apakah jumlah dan kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan badan) di kantor KPP pratama Palembang seberang ulu?. tujuanya untuk Untuk mengetahui pengaruh jumlah dan kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Pelembang Seberang Ulu dan Untuk mengetahui pengaruh jumlah dan kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Pelembang Seberang Ulu. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Terdapat tiga variabel yaitu dua variabel terikat dan satu variabel bebas. Variabel terikat terdiri dari dua yaitu jumlah wajib pajak dengan 1 indikator dan jumlah penerimaan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan 1 indikator serta satu variabel bebas yaitu penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) dengan 1 indikator . Data yang diperlukan dalam peneliti ini adalah data Primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah Wawancara dan dokumentasi. Teknik analaisis adalah regrasi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan tidak adanya pengaruh jumah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak peneghasilan orang pribadi secara silmutan dan tidak adanya pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan badan secara parsial.

Kata kunci : jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan, jumlah penrimaan SPT tahunan, dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan badan.

ABSTRACT

Yuyun /2220297.P/2014/ the influence of taxpayers number and taxpayer compliance to the receipt of personal and department income tax number of tax at the pratama tax office Palembang seberang ulu/taxing.

The problem solving of this was whether the number of the tax payer and the compliance of the tax simultaneously influence the receipts of income tax (personal or department) at KPP Pratama office Palembang seberang ulu. and whether the tax payer compliance partially influenced to the income tax (personal and department) at KPP pratama office. The purpose of this was to know the influence of number and the tax payer compliance simultaneously to the receipts of income tax (personal and department) at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu and to know the influence of tax payer numbers and the compliance of tax payer simultaneously to the income tax receipt (personal and department) at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. this research was associative research that was conducted to know the influence of the tax payer number and the compliance of tax payer to the receipts of income tax (personal and department) at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. There were three variables used, two variables were connected to the other independent variables. the dependent variables consisted of the number of tax payer with 1 indicator and the number of annual notification receipts (SPT). With one indicator and one independent variable is the receipts of income tax (personal and department) with 1 indicator. The data that was used in this research was the primary and secondary data. While the technique of collecting the data was interview and documentation. The analysis technique was multiple linear regression. The analysis result showed that there was no influence of tax payer number and the compliance of tax payer to the receipts of income tax of personal simultaneously and there was no influence of tax payer number and the compliance of tax payer to the receipt of personal and department income tax partially.

Keywords: *the number of personal and department tax payer, the number of annual SPT receipts, and income receipt for personal and department.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama pendapatan di seluruh negara di belahan dunia. Pajak ditempatkan Indonesia sebagai penerimaan utama untuk memantapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasil pembayaran pajak dari masyarakat utamanya digunakan untuk membangun negara ini agar hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati masyarakat. Pendapatan dari pajak juga digunakan untuk belanja negara yang bersifat rutin yang tentu saja ditujukan bagi kesejahteraan warga negara Republik Indonesia. Pentingnya peranan pajak bagi negara ini telah digambarkan dari uraian diatas. Maka dari itu, pemerintah sangat berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dari penerimaan pajak ke dalam kas negara.

Perpajakan merupakan sektor pendapatan Negara yang diperoleh dari masyarakat dan dikeluarkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat. sebagai sumber penerimaan Negara yang sangat potensial pajak merupakan peranan yang sangat penting untuk menunjang pembiayaan Negara baik untuk belanja rutin maupun untuk belanja pembangunan, karena sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari sektor perpajakan.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat, untuk merealisasikan tujuan tersebut harus memperhatikan masalah pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, dengan demikian peran pajak dalam perkembangan perekonomian Indonesia sangatlah penting.

Pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, dimana dari hasil penerimaan pajak tersebut pemerintah dapat menjalankan rumah tangga pemerintah seperti digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan bangunan. Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan Negara dan berdasarkan jenis Pajak Penghasilan (PPH) telah memberikan kontribusi terbesar, namun PPH hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rocmat Soemitro, 2002: 1). Jika pajak dapat dipungut secara maksimal sesuai dengan potensinya maka negaran akan lebih leluasa untuk membelanjakan dengan memperbaiki fasilitas umum maupun layanan masyarakat yang lebih baik dan pemerintah juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan Negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang ada dibawah naungan kementerian keuangan republik Indonesia. sebagai unsur pendapatan Negara, pajak menjadi sumber pembiayaan

pembangunan Negara maka Direktorat Jenderal Pajak berupaya menggali potensi pajak semaksimal mungkin dengan cara meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penegakan hukum dan perubahan peraturan perundang-undang pajak guna menciptakan masyarakat yang taat pajak serta meringankan beban wajib pajak.

UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengingat pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka tingkat peningkatan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak harus diperhatikan guna meningkatkan pajak penghasilan.

Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan system pemungutan pajak penghasil secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhitung. Penerapan ini agar administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah diharapkan dengan dilakukan pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar

untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya. Sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka berjalannya system pemungutan pajak yang dianut oleh undang-undang perpajakan Indonesia yaitu *self assessment system*.

Kepatuhan wajib pajak terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan material, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Tingkat kepatuhan dapat dilihat dari penyampaian SPT tahunan yang tepat waktu.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu berada dalam wewenang Direktorat Jendral Pajak, dimana tugas utamanya yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan, khususnya pajak pusat dalam wewenangnya masing-masing berdasarkan teknis yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang Berada di bawah Kanwil Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel I.1
Data Jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi) Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Penerimaan Pajak Pribadi
1	2008	17.742	1.971.625.165
2	2009	28.379	937.507.623
3	2010	35.884	751.498.090
4	2011	41.974	928.254.312
5	2012	47.912	1.023.736.241

Sumber: KKP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2013

Tabel I.2
Data Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan pajak penghasilan (Badan) Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Badan	Jumlah Penerimaan Pajak Badan
1	2008	2.119	2.399.120.460
2	2009	2.323	4.365.991.841
3	2010	2.524	32.017.843.763
4	2011	2.765	34.831.097.839
5	2012	3.108	38.723.491.363

Sumber: KKP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2013

Berdasarkan tabel I.1 dan I.2 di atas dapat diketahui, bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak dan Peningkatan penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan) namun tidak Proporsional. Untuk mengetahui hubungan antara jumlah dan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka peneliti akan mengangkat judul **pengaruh jumlah wajib pajak dan**

kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi Dan Badan) Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan badan) di KPP Pratama Palembang seberang ulu?
- b. Apakah jumlah dan kepatuhan wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan badan) di KPP Pratama Palembang seberang ulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dan kepatuhan wajib pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
- b. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dan kepatuhan wajib pajak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan (Orang Pribadi dan Badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

menambah wawasan keilmuan mengenai perpajakan serta mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Serang Ulu.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Hasil dari peneliti ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam rangka meningkatkan kewajiban perpajakan.

3. Bagi almamater

Sebagai referensi dan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa akuntansi sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Berikut ini yang mendukung penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Table II.1

Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Judul, Tahun	Hasil Penelitian	Relevan
1.	Reza . pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan (2009).	kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21	Persamaan: Sama-sama meneliti kepatuhan Wajib Pajak Perbedaan: Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban dan peraturan perpajakan, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis menganalisis pengaruh jumlah dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan).
2.	Ari. berjudul pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas <i>self assessment system</i> (2010).	Mengetahui kepatuhan wajib pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap efektivitas sistem menghitung pajak sendiri. Mengetahui kualitas informasi akuntansi keuangan berpengaruh terhadap efektivitas sistem menghitung	Persamaan: Sama-sama meneliti kepatuhan Wajib Pajak Perbedaan: perbedaanya adalah penelitian sebelumnya menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas <i>self assessment system</i> ,

		pajak sendiri	sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis menganalisis pengaruh jumlah dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan).
3	Mira. Berjudul pengaruh <i>sunset policy</i> terhadap kepatuhan wajib pajak (2010)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum program <i>sunset policy</i> diberlakukan tingkat kepatuhan wajib pajak masi rendah dan pada saat program <i>sunset policy</i> dilaksanakan terdapat tingkat kepatuhan wajib pajak serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan membenahan administrasi wajib pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistematis dan berkesinabungan terhadap wajib pajak, dan penegakan hokum	Persamaan: Sama-sama meneliti kepatuhan wajib pajak perbedaan: penelitian sebelumnya menganalisis pengaruh <i>sunset policy</i> terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penulis menganalisis pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan).

Sumber: Penulis, 2014

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang kemukakan oleh Soemitro, (dalam Herry, 2010: 7)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa secara timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dikoreksi yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen*.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu terdiri dari:

1) Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber pemerintahan untuk membiaya pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

2) Fungsi *regulated* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan (Siti, 2009: 3).

c. Jenis-Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pajak langsung

Pajak yang harus dikumpul dan ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

b) Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terhutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

2) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a) Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b) Pajak dactrah

Pajak yang pengenaannya yang memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. (Siti. 2009: 7-9)

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila bagian pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Early, 2006: 79). Pajak penghasilana (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Siti, 2009: 80).

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Siti, 2009: 81-82).

Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1, subjek pajak penghasilan dikelompokkan sebagai berikut:

1) Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun diluar Indonesia.

2) Subjek pajak warisan

Subjek pajak warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak itu adalah ahli waris.

3) Subjek pajak badan

Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang ada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2 subjek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak dalam negeri.

1) Subjek pajak dalam negeri, adalah:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi Kriteria:
 - (1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

(3) Penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak Luar Negeri, adalah:

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usah tetap di Indonesia.

b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

c. Objek pajak penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima

atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Siti, 2009: 86-87).

3. Wajib pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu (Early, 2006: 3)

b. Jenis-Jenis Wajib Pajak

Wajib pajak terdiri dari tiga, yaitu:

1) Wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak arang pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun diluar Indonesia, dan tidak melihat batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*nondiscrimination*).

2) Wajib pajak badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, kongsi, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3) Kewajiban pajak bendaharawan

Wajib pajak bendaharawan adalah bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara lainnya dan kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan (Herry, 2010: 78).

c. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha

dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

- 3) Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, Arab, Angka Arab, Satuan Mata Uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau di kukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- 4) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah tanpa yang diizinkan, yang pelaksanaanya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- 5) Membayar atau menyetor pajak terhutang dengan menggunakan SSP ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- 6) Membayar pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya aturan ketetapan pajak.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- 8) a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
- b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c) memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila di periksa.
- d) Hak-hak wajib pajak

Hak-hak wajib berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPM.
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
- 3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT pajak penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak.

- 4) Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- 5) Mengajukan permohonan pengambilan keputusan kelebihan pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
 - a) Surat ketetapan pajak kurang bayar.
 - b) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.
 - c) Surat ketetapan pajak nihil.
 - d) Surat ketetapan pajak lebih bayar, atau
 - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- 8) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
 - a) Surat ketetapan pajak kurang bayar.
 - b) Surat ketetapan pajak kurang bayar tambah.
 - c) Surat ketetapan pajak nihil.
 - d) Surat ketetapan pajak lebih bayar, atas
 - e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 9) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.

- 10) Menunjuk seorang dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 11) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No.36 Tahun 2008.

4. kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dan terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi

kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir, kepatuhan materil meliputi juga kepatuhan formal (Widi, 2010: 68-70)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003, Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir menyampaikan SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- d. Tindak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak.
 - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapatan wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak (Siti, 2009: 26). Berdasarkan undang-undang No.36 Tahun 2008 pasal 1 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor direktorat jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib pajak. Kewajiban mendaftarkan diri ini berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

b. Fungsi NPWP

Selain sebagai identitas bagi wajib pajak, nomor pokok wajib pajak juga memiliki fungsi:

1. untuk keperluan yang berkaitan dengan dokumen perpajakan.
2. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP.
3. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajib pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor (PPUD, atau PIUD).
4. Dapat digunakan untuk melakukan berbagai usaha yang berhubungan dengan pihak lain (Agus, 2011: 19).

6. Surat Pemberitahuan**a. Pengertian Surat Pemberitahuan**

Sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melapor perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan (SPT) Merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah

dan menandatangani serta menyampaikan ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jendral pajak (Siti, 2009: 44).

b. Fungsi Surat Pemberitahuan

Wajib pajak adalah sebagian sarana untuk melaporkan dan mempetanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemugutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- 3) Harta dan kewajiban
- 4) Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang permohonan atau pemugutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti, 2009: 44).

7. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan wajib pajak dengan penerimaan pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK/01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak, bahwa dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan *Good Governance* dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektifitas organisasi instansi

vertikal di lingkungan Direktorat Jendral Pajak, maka perlu dilakukan penetaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal dilingkungan Direktorat Jendral Pajak. Salah satu instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP Pratama.

Pelaksanaan *Good Governance* dan peningkatan penerimaan pajak penghasilan serta efektivitasn organisasi instansi vertikal dilingkungan direktorat jendral pajak dapat diwujudkan melalui menyelenggarakan beberapa fungsi yang terdapat pada KPP Pratama, salah satunya yaitu pelaksanan program ekstensifikasi merupakan usaha peningkatan usaha peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan memfokuskan pada penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi dirjen pajak.

Penambahan jumlah wajib pajak mempunyai dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal ini terbukti dalam program yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi yang mengemban amanah mengumpulkan dana dari masyarakat berupa pajak yang tentunya nanti akan berujung pada penggunaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat.

Program ekstensifikasi melalui peningkatan wajib pajak dapat kita lihat secara nyata melalui salah satu program Direktorat Jendral Pajak berupa *sunset policy*. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak yaitu melalui upaya peningkatan jumlah wajib pajak

merupakan langka direktorat jendral pajak dalam peningkatan penerimaan pajak. (sumihar dalam *observation and research or taxation*, 2010).

b. Hubungan kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana pernyataan yang telah dikemukakan di atas, dalam sistem *self assessment* yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Hal serupa pernah dikemukakan oleh mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip dalam situs resmi Direktorat Jendral Pajak, yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dan melaksanakan upaya Intensifikasi, direktorat jendral pajak akan melakukan upaya penegakan hukum atau *law inforcement*.

Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penagihan, pemeriksaan penyampaian SPT dan penyelidikan. (Badan kebijakan fiskal, 2010) Semua upaya tersebut pada gilirannya nanti sangat diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat

disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak itu sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak.

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian pustaka, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

- a. Diduga Jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak badan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.
- b. Diduga Jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak badan secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan wajib pajak penghasilan (orang pribadi dan badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis-jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplansinya terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Penelitian deskriptif

penelitian deskriptif adalah yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independenst*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan, yang variabelnya masi sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian asosiatif

Penelitian asosiatif adalah yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel atau lebih. (Sugiono, 2006: 11).

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan) di KPP Pratama Palembang seberang ulu.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Yang Beralamat Di Jalan Jendral Ahmad Yani No.59 Kelurahan 14 Ulu Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Oprasionalisasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Jumlah wajib pajak (X1)	Merupakan keseluruhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Prtama Palembang Seberng Ulu	Data Jumlah wajib pajak dari tahun 2008-2012
2	Kepatuhan wajib pajak (X2)	Merupakan suatu keadaan dimna wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.	Jumlah wajib pajak yang menyampaikan/ melaporkan SPT Tahunan yang tepat waktu dari tahun 2008-2012
3	Penerimaan pajak penghasilan (Y)	Merupakan penerimaan yang diterima dari seluruh pembayaran pajak penghasilan pribadi dan badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	Jumlah penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2008-2012

Sumber : Penulis 2014

D. Data Yang Diperlukan

Sumber data terdiri dari:

- 1) Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). (Nur dan Bambang, 2009 146-147).

Adapun data yang diperlukan dalam peneliti ini adalah data Primer dan data sekunder. data primer yaitu penulis mengambil data langsung dari tempat penelitian tanpa melalui perantara yaitu wawancara pada pegawai KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sedangkan Data Sekunder berupa jumlah wajib pajak, jumlah SPT yang disampaikan dan jumlah penerimaan PPh orang pribadi dan badan dari tahun 2008-2012 dan gambaran umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Anwar (2011: 105-114) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1) Survei

Merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis.

a) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

b) Kuesioner

Merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dan bersedia memberikan respon sesuai permintaan pengguna.

2) Observasi

Merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

3) Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara yaitu dengan cara melakukan komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak-pihak berwenang atau orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.
- b) Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan catatan tertulis atau dokumen-dokumen mengenai sejarah KPP Pratama Palembang Seberng Ulu, struktur organisai, jumlah wajib pajak badan dan pribadi, jumlah penerimaan SPT Tahunan dan jumlah penerimaan PPh orang pribadi dan badan.

F. Analisis Data Dan Teknik Analisis

1. Analisis data (Soeratno dan Arsyad, 2003: 126) terdiri dari:

- a) Analisis data kualitatif

Adalah analisis yang bukan berbentuk angka-angka dan biasanya sulit diukur.

- b) Analisis kuantitatif

Adalah analisis yang dapat dinyatakan dalam angka-angka dan dapat dihitung dengan rumus statistik.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung jumlah wajib pajak, jumlah Surat pemberitahuan (SPT) dan jumlah penerimaan pajak penghasilan (Orang pribadi dan badan)

Dengan membuat hubungan pemodelan hubungan (Korelasi, Regresi, ANOVA) menggunakan program *statistical product and services solution* (SPSS). Analisis kualitatif digunakan untuk menguraikan pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasila (orang pribadi dan badan) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

2. Teknik Analisis

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Kemudian dilakukan uji hipotesis baik secara parsial (uji t) maupun silmutan (uji f). data-data yang telah dikumpul diolah menggunakan program komputer *statistical product and services solution* (SPSS) *version 19 for windows*. Adapun langkah-langkah untuk mengelolah datayang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu distribusi data normal atau mendekati normal. pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukakn dengan metode kolmogorov-smirnov yaitu dengan membandingkan hasil kolmogorov-smirnov hitung dengan kolmogorov-smirnov tabel dengan ketentuan apabila nilai kolmogorof-smirnov hitung lebih kecil dari nilai kolmogorov-smirnov table, maka distribusi data adalah tidak normal dan sebaliknya apabila nilai

kolmogorof-smirnov hitung lebih besar dari nilai kolmogorof-smirnov table, maka distribusi data adalah normal.

b. Uji asumsi klasik

Pengujian ini bertujuan agar suatu model regresi dapat menghasilkan penduga yang tidak bias. Pengujian asumsi klasik terdiri dari:

1) Uji autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara anggota observasi yang terletak berderatan. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji autokorelasi ini menggunakan *durbin Watson test*.

2) Multikolineiritas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model, yaitu jika suatu variabel independen mempunyai nilai *variance inflation factor* (VIF) > 10 berarti telah terjadi multikolinieritas.

3) Uji heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada dalam suatu model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual suatu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah uji *glejser*.

c. Uji regresi linear berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Keterangan:

Y = Penerimaan pajak

X_1 = Jumlah Wajib Pajak

X_2 = Tingkat kepatuhan wajib pajak

a = konstanta

b_1 = koefisien regresi ke-1

b_2 = koefisien regresi ke-2

d. Uji Hipotesis

1) Uji F (secara bersamaan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.

a) Menentukan hipotesis

H_0 = jumlah Wajib Pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan).

H_1 = jumlah Wajib Pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan).

b) Kriteria pengujian

H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $f_{hitung} < \text{dari } f_{table}$

H_1 diterima dan H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > \text{dari } t_{tabel}$

2) Uji t (secara parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

a). Menentukan Hipotesis

HO1 = jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan).

Ha1 = jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan).

HO2 = kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan).

Ha2 = kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (orang pribadi dan badan).

b). Kriteria pengujian

Ho diterima dan H_1 ditolak apabila $t \text{ hitung} < \text{dari } t \text{ tabel}$

H_1 diterima dan Ho ditolak apabila $t \text{ hitung} > \text{dari } t \text{ tabel}$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu dari tiga Kantor Pelayanan Pajak yang ada di kota Palembang. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan unit vertikal dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Memiliki wilayah kerja meliputi empat kecamatan yaitu Seberang Ulu II, Plaju, Dan Kertapati.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu didirikan, dan resmi beroperasi pada tanggal 9 september 2008 berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu dari tiga kantor pelayanan pajak yang ada di kota Palembang. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan unit vertikal dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Memiliki wilayah kerja meliputi empat kecamatan yaitu Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Plaju, dan Kertapati.

a. Visi dan Misi

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu memiliki Visi dan Misi yang hendak dicapai. Visi dan Misi tersebut mengacu kepada visi, misi dan Direktorat Jenderal pajak karena kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel adalah unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal pajak. Visi, Misi dan nilai tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal pajak adalah menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2) Misi Direktorat Jenderal pajak

Menghimpun pemerintah pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Misi Direktorat Jenderal pajak ini kemudian dijabarkan lagi dalam beberapa bidang:

a) Bidang Fisikal

Menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

3) Bidang Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan an ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang dapat meminimasi distoris.

4) Bidang Politik

Mendukung proses demokratisasi di segala bidang pemerintah.

5) Bidang Kelembagaan DJP

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

b. Struktur Organisasi

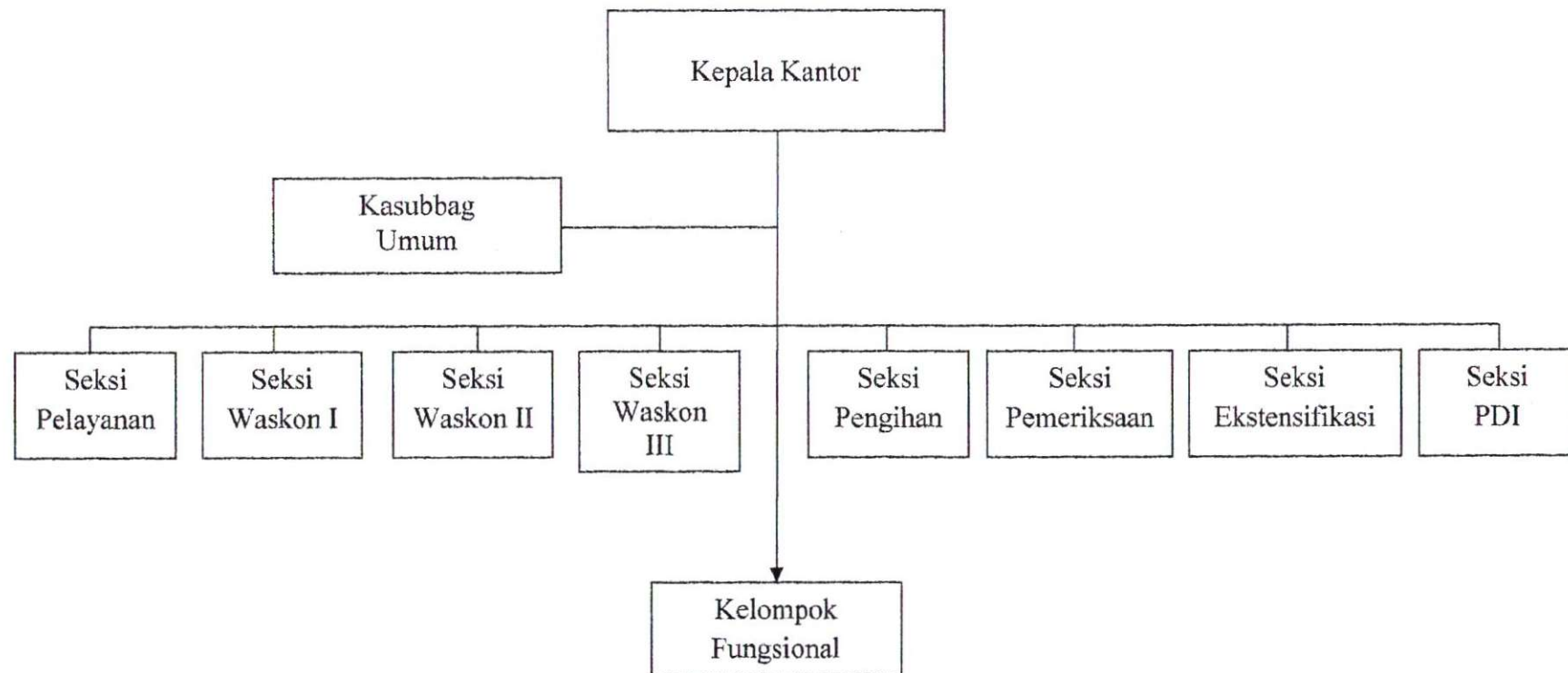
Struktur organisasi adalah susnsunan komponen –komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagai mana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut di integrasikan (koordinasikan). Selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialis-spesialis pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur organisasi pada umumnya kemudian digambarkan dalam suatu bagan yang disebut bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi yang formal, yang tersusun secara hierarkis.

Berikut ini skema organisasi KPP Pratama Plalembang Seberang Ulu:

Gambar 4.1

Skema Organisasi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu



Sumber: Bagian Umum KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah menata dan mengadministrasikan perpajakan, serta mengamankan penerimaan pajak diwilaya kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu terdiri dari beberapa seksi yang menunjang tugas pokok tersebut.

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi dari seksi-seksi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu :

1) Kepala Kantor

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasanwajib pajak dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya serta pajak bumi dan banguna dlam wilaya wewenangnya berdasarakan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Umum

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan ruamah tangga dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan serta perlengkapan.

3) Seksi Pengolaan Data Dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pencairan dan pengolahan data pengamatan potensi pajak, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan, teknisi komputer, aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kerja.

4) Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi serta melakukan kerja sama perpajakan.

5) Seksi Pengawasan Dan Konsultasi

Melakukan pengawasan keputusan WP, bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan bagi WP, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, Melakukan rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

6) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Hanya ada di KPP Pratama bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan, pengamatan potensi pajak, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

7) Seksi Penagihan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Seksi Pemeriksaan

Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan , pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak seta administrasi perpajakan lainnya.

9) Kelompok Fungsional

Kelompok Fungsional bertugas melaksanakan semua bentuk pemeriksaan wajib pajak dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala kantor.

2. Deskripsi Variabel

a. Jumlah wajib pajak

Jumlah wajib pajak adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Wajib pajak yang menjadi objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Besar perubahan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Serang ulu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Table IV.1
Jumlah Wajib Pajak
Tahun 2008-2012

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Badan
1	2008	17.742	2.119
2	2009	28.379	2.323
3	2010	35.884	2.524
4	2011	41.974	2.765
5	2012	47.912	3.108

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 2014

Berdasarkan table IV.1 di atas Dapat diketahui bahwa penerapan *self assessment system* pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu sudah berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, namun peningkat tersebut kurang profesional.

b. kepatuhan wajib pajak

tingkat kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak terdiri dari kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), Kepatuhan Dalam Penghitungan Wajib Pajak Terutang, Dan Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggakan. Tingkat Kepatuhan Dapat Dilihat Dari Jumlah Penyetoran Kembali Surat Pemberitahuan Sebagai Berikut:

Tabel IV.2
Jumlah (Lembar) Surat Pemberitahuan
Tahun 2008-2012

No	Tahun	SPT Tahunan Orang Pribadi (Lembar)	SPT Tahunan Badan (Lembar)
1	2008	8.693	805
2	2009	13.154	803
3	2010	15.074	821
4	2011	16.867	833
5	2012	14.870	796

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 2014

Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerimaan surat pemberitahuan tahunan Orang Pribadi dan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu jumlah SPT mengalami peningkatan namun kurang proporsional. Hal ini dikarenakan ketidak patuhan wajib pajak orang pribadi dan badan dalam memenuhi kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyampaikna surat pemberitahuan tahunan orang pribadi dan badan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

c. Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) adalah merupakan penerimaan yang diterima dari seluru pembayaran pajak penghasilan orang pribadi dan badan di KPP Pratama Palembag Seberang Ulu

Tabel iv.3
Jumlah penerimaan pajak penghasilan
Periode tahun 2008 hingga desember 2012

No	Tahun	Jumlah Jumlah penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi	Jumlah Penerimaan Pajak penghasilan Badan
1	2008	1.971.625.165	2.399.120.460
2	2009	937.507.623	4.365.991.841
3	2010	751.498.090	32.017.843.763
4	2011	928.254.312	34.831.097.839
5	2012	1.023.736.241	38.723.491.363

Sumber: KKP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2014

Berdasarkan dari table IV.3 di atas dapat diketahui jika penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan badan pada kantor pelayan pajak pratama Palembang seberang ulu belum optimal dan kurang professional.

3. Hasil Uji Data

Sebelum menentukan pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan badan, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap data yang diperoleh. Pengujian yang dilakukan terdiri dari uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

a. Uji Normalitas Data

pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *kolmogrov-smirnov*. Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS For windows diperoleh sebagai berikut :

Tabel iv.4
Hasil ujian normalitas data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		WP Orang Pribadi dan Badan (X1)	SPT Tahunan OP dan Badan(X2)	Jumlah Penerimaan PPH OP dan Badan (Y)
N		5	5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	36946,00	15183,60	23556376907
	Std. Deviation	12163,784	3846,013	17261011072
Most Extreme Differences	Absolute	,148	,159	,303
	Positive	,124	,136	,255
	Negative	-,148	-,159	-,303
Kolmogorov-Smirnov Z		,331	,355	,678
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,000	1,000	,747

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil pengolahan data, 2014

hasil perhitungan normalitas data tersebut diperoleh bahwa nilai kolmogorov.smirnov Z hitung untuk variabel jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan sebesar 0,331 untuk variabel jumlah penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi dan badan sebesar 0,355. Jika nilainya diatas 5%, Data Dari Variabel-Variabel Tersebut Berdistribusi Normal. Berdasarkan tabel IV.4 Dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini dinyatakan normal.

b. Uji Asumsi Klasik

Untuk melihat apakah hasil regresi untuk model sudah memenuhi kriteria *Best linear unbiased estimate* (BLUE) atau belum, maka perlu dilakukan beberapa pengujian terhadap pelanggaran asumsi klasik yang meliputi :

1) uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat antara variabel-variabel independen yang di ikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami multikolonearitas dapat diperiksa dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF) Untuk Masing-Masing Variabel Independen.

Tabel IV.5
Hasil Pengujian Multikolonearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	WP Orang Pribadi dan Badan (X1)	,009	114,213
	SPT Tahunan OP dan Badan(X2)	,009	114,213

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan PPh OP dan Badan (Y)

Sumber : Hasil pengolahan data, 2014

Nilai VIF pada tabel tersebut menunjukan bahwa VIF untuk masing-masing variabel bebas menunjukkan bahwa variabel-variabel VIF dalam penelitian ini lebih besar dari 10 ($VIF > 10$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dependen dalam penelitian ini terjadi gejala multikolinearitas.

2) Uji Autokorelasi

Adanya autokorelasi dalam regresi dapat diketahui dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikansi tidak kuat.

Tabel IV.6
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,951 ^a	,905	,809	7535766047	2,233

- a. Predictors: (Constant), SPT Tahunan OP dan Badan(X2), WP Orang Pribadi dan Badan (X1)
- b. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan PPh OP dan Badan (Y)

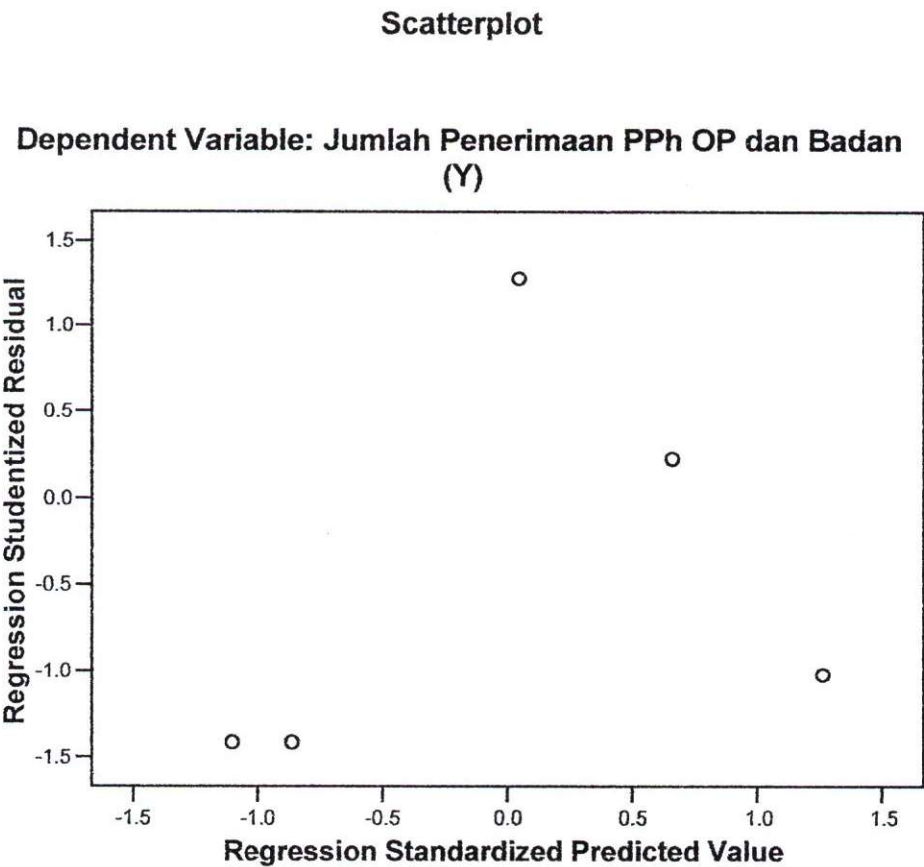
Sumber : Hasil pengolahan data, 2014

Berdasarkan hasil tabel IV.5 didapat nilai *durbin-watson* yang dihasilkan dari model regresi adalah 2,233 dengan signifikan 5 %.ini menunjukkan bahwa model ini tidak mengalami gejala autokorclasi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidak samaan dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas.

Grafik IV.1
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Pada grafik IV.1 Tampak titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, Tidak Terjadi Pola Tertentu, Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

C. Uji Regresi Linear

1. Uji Regresi Linear Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Hasil analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Y). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen apakah mengalami penurunan atau kenaikan. Dengan menggunakan bantuan *statistical product and services solution (spss) version 19 for windows*. Dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel VI.7

Hasil pengujian regresi linear

Model summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate	Durbin-Watson
1	.905	.819	.639	2.91464810E8	2.518

a. Predictors : (Constant), SPT, Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : Penulis, Hasil pengolahan data, 2014

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat diinterpretasikan bahwa koefisien determinasi (R^2) = 0,819 ini berarti bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dapat dipengaruhi oleh variabel penjelas,

pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan surat pemberitahuan tahunan orang pribadi sebesar 81.9%. dan ini berarti bahwa adanya korelasi yang sangat kuat anantara jumlah wajib pajak,penerimaan SPT Tahunan orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebesar 81.9%.

Tabel IV.8
Hasil pengujian Regrasi Linear Berganda

Coefficients					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.173E9	7.181E8		.048
	WP Orang Pribadi (X1)	119.989	257..181	.292	.687
	SPT Tahunan Op(X2)	-1793.876	975.340	-1.150	.207

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan PPh OP dan Badan (Y)

Sumber : hasil pengolahan data. 2014

Pada tabel IV.8 dapat dilihat hasil uji regresi pada variabel jumlah wajib pajak (X^1) dan penerimaan SPT Tahunan orang pribadi (X^2) Terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) dan persamaan regresinya adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$Y = 3.173 + 119.989X_1 + -1793.876X_2$$

Nilai koefisien regresi jumlah wajib pajak (X_1), adalah sebesar 119.989 artinya jika ada peningkatan jumlah wajib pajak (X_1) sebesar

100%, maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) sebesar 12%. Sebaliknya, jika ada penurunan wajib pajak (X_1) sebesar 100%, maka akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) sebesar 12%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang setara antara penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan variabel jumlah wajib pajak (X_1). Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak (X_1) maka akan meningkat juga penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) dan begitu juga sebaliknya.

Nilai koefisien regresi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X_2) adalah sebesar -1793.876 artinya jika ada penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X_2) sebesar 100 %, maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) Sebesar 18%. sebaliknya, jika ada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X_2) sebesar 100 %, maka akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) sebesar 18 %.

Berdasarkan hasil koefisien bernilai negative artinya terjadi hubungan yang tidak searah antara penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan variabel kepatuhan wajib pajak (X_2).

2. Uji Regresi Linear Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Kepatuhan
Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil analissi regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen denngan variabel dependen (Y). analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing berhubungan positif atau negative dan utuk memprediksi nilai dari variabel independen apakah mengalami peneurunan atau kenaikan. Dengan menggunakan bantuan *statistical product and services solution (spss) version 19 fir windows*. Dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel VI.7
Hasil pengujian regresi linear
Model summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Errir of The Estimate	Durbin-Watson
1	.960	.921	.842	7.00442554E9	3.510

- a. Predictors : (Constant), SPT, Wajin Pajak
 - b. Dependen Variabel: Penerimaan Pajak
- Sumber : Hasil pengolahan data, 2014

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat di interprestasikan bahwa koefisien determinasi (R^2) = 0,921 ini berarti bahwa penerimaan pajak penghasilan Badan dapat dipengaruhi oleh variabel penjelas, jumlah wajib pajak dan penerimaan surat pemberitahuan tahunan badan sebesar 92,1%. dan ini berarti bahwa adanya korelasi yang sangat kuat anantara

jumlah wajib pajak,penerimaan SPT Tahunan Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebesar 92.1%.

Tabel IV.8
Hasil pengujian Regrasi Linear Berganda

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.132E11	1.898E11		-2.177	.161
	P Orang Pribadi (X1)	40500148.768	9090150.790	.887	4.455	.047
	SPT Tahunan Op(X2)	4.086E8	2.826E8	.350	1.757	.221

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan PPh OP dan Badan (Y)

Sumber : hasil pengolahan data. 2014

Pada tabel IV.8 dapat dilihat hasil uji regresi pada variabel jumlah wajib pajak (X^1) dan penerimaan SPT Tahunan Badan (X^2) Terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan (Y) dan persamaan regresinya adalah:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$Y = -4.132 + 40.500.148.768X_1 + 4.086X_2$$

Nilai koefisien regresi jumlah wajib pajak (X_1), adalah sebesar 40.500.148.768 artinya jika ada peningkatan jumlah wajib pajak (X_1) sebesar 100%, maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Badan (Y) sebesar 40%. Sebaliknya, jika ada penurunan wajib pajak (X_1)

sebesar 100%, maka akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan Badan (Y) sebesar 41%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang setara antara penerimaan pajak penghasilan Badan dengan variabel jumlah wajib pajak (X_1). Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak (X_1) maka akan meningkatkan juga penerimaan pajak penghasilan Badan (Y) dan begitu juga sebaliknya.

Nilai koefisien regresi kepatuhan wajib pajak Badan (X_2) adalah sebesar 4.086 artinya jika ada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X_2) sebesar 100 %, maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Badan (Y) Sebesar 49%. sebaliknya, jika ada penurunan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (X_2) sebesar 100%, maka akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y) sebesar 49%.

Berdasarkan nilai Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang setara antara penerimaan pajak penghasilan Badan dengan variabel kepatuhan wajib pajak (X_2). Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak (X_2) maka akan meningkat juga penerimaan pajak penghasilan Badan (Y) dan begitu juga sebaliknya.

D. Uji hipotesis

1) Uji F (Secara silmutan)

- a. Uji F secara simultan Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Untuk menguji pengaruh variabel jumlah wajib pajak orang pribadi dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dapat dilihat pada analisis varians atau uji statistik F. berikut ini hasil uji F:

Tabel IV.8
Hasil Uji F

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Squa	F	Sig.
1	Regression	7.705E17	2	3.852E17	4.535	,181 a
	Residual	1.699E17	2	8.495E16		
	Total	9.404E17	4			

a. Predictors: (Constant), SPT Tahunan OP (X2), WP Orang Pribadi (X1)

b. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan PPh OP (Y)

Sumber : Hasil pengolahan data, 2014

- a) Menentukan Formulasi hipotesis

H_0 : Jumlah Wajib Pajak orang pribadi dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

H_1 : Jumlah wajib pajak orang pribadi dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

- b) menentukan taraf nyata (α) dan nilai F_{table} .

dengan menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau dengan derajat kebebasan $df (n-k-1)$ atau $5-2-1=2$ maka diperoleh hasil F_{table} sebesar 19,000.

- c) Menentukan kriteria pengujian

H_0 diterima jika $< F_{table}$

H_0 ditolak jika $> F_{table}$

- d) Menentukan nilai uji statistik

Berdasarkan table ANOVA dapat dilihat bahwa sig 0,181 dan $F_{hitung} = 4.535$

- e) Membuat kesimpulan

Nilai $F_{hitung} < F_{table}$ ($4.535 < 19,000$) dan sig $0,181 < 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya jumlah wajib pajak orang pribadi dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Begitu juga hasil atau *output* pengujian statistik berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menghasilkan koefisien determinasi (R^2) = 0,819 ini berarti bahwa jumlah wajib pajak, jumlah penerimaan SPT tahunan orang pribadi dan badan memberikan persentase sumbangan sebesar 82 % terhadap penerimaan pajak

penghasilan orang pribadi , sedangkan sisanya 18 % penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di pengaruhi oleh faktor lain seperti: pemeriksaan atau peneingkatan setoran jumlah wajib pajak, pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan wajib pajak.

b. Uji F (Secara simultan) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Untuk menguji pengaruh variabel jumlah wajib pajak Badan dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Badan secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan, dapat dilihat pada analisis varians atau uji statistik F. berikut ini hasil uji F:

Tabel IV.8
Hasil Uji F

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Squa	F	Sig.
1	Regression	1.141E21	2	5.703E20	11.624	,079 a
	Residual	9.812E19	2	4.906E19		
	Total	1.239E21	4			

a. Predictors: (Constant), SPT Tahunan Badan (X2), WP Badan (X1)

b. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan PPh Badan (Y)

Sumber : Hasil pengolahan data, 2014

- a) Menentukan Formulasi hipotesis

H_0 : Jumlah Wajib Pajak badan dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Badan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

H_1 : Jumlah wajib pajak badan dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Badan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

b) menentukan taraf nyata (α) dan nilai F_{table} .

dengan menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ atau dengan derajat kebebasan $df (n-k-1)$ atau $5-2-1=2$ maka diperoleh hasil F_{table} sebesar 19,000.

c) Menentukan kriteria pengujian

H_0 diterima jika $< F_{table}$

H_0 ditolak jika $> F_{table}$

d) Menentukan nilai uji statistik

Berdasarkan table ANOVA dapat dilihat bahwa sig 0,079 dan $F_{hitung} = 11.624$

e) Membuat kesimpulan

Nilai $F_{hitung} < F_{table}$ ($11.624 < 19,000$) dan sig $0,079 < 0,05$ maka H_0 diterima yang artinya jumlah wajib pajak Badan dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Badan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Begitu juga hasil atau *output* pengujian statistik berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menghasilkan koefisien determinasi (R^2) = 0,921 ini berarti bahwa jumlah wajib pajak, jumlah penerimaan SPT tahunan orang pribadi dan badan memberikan persentase sumbangan sebesar 92 % terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, sedangkan sisanya 8 % penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di pengaruhi oleh faktor lain seperti: pemeriksaan atau peneingkatan setoran jumlah wajib pajak, pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pendapatan wajib pajak.

2. Uji t (secara parsial)

a. Uji t (secara parsial) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pengujian hipotesis uji t ini digunakan Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. dapat dilihat pada uji statistik t berikut ini:

Tabel IV.8
Hasil pengujian Regresi Linear Berganda

Coefficients					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.173E9	7.181E8		.048
	WP Orang Pribadi (X1)	119.989	257..181	.292	.687
	SPT Tahunan Op(X2)	-1793.876	975.340	-1.150	.207

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan PPh OP dan Badan (Y)

Sumber : hasil pengolahan data. 2014

- a. Menentukan formulasi hipotesis

H_0 : X_i tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

H_1 : X_i berpengaruh signifikan terhadap Y

- b. Menentukan taraf nyata α dengan table

Dengan taraf nyata $\alpha = 5 \%$, $df (n-k-1) = (5-2-1)$, nilai t table didapat sebesar 4,303.

- c. Menurut Kriteria Pengujian

H_0 diterima jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$

H_0 ditolak jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

- d. Menentukan nilai uji statistik

berdasarkan tabel IV.9 didapat t hitung untuk variabel jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan (X_1) adalah sebesar 467 dan t hitung untuk variabel Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan (X_2) adalah sebesar -1,839

e. Membuat kesimpulan

Pada variabel jumlah wajib pajak orang pribadi (X_1) nilai t hitung $< t$ table ($467 < 4,303$) dan $\text{sig } 0,687 > 0,05$, Maka H_0 diterima. Ini berarti jumlah wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Pada variabel jumlah penerimaan surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi (X_2), nilai t hitung $< t$ tabel ($-1,839 < 4,303$) dan $\text{sig } 0,207 < 0,05$, maka H_0 diterima. Ini berarti bahwa jumlah surat pemberitahuan (SPT) tahunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis secara parsial uji (t) diperoleh hasil untuk variabel jumlah wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Jumlah wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan ini disebabkan oleh beberapa faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi disebabkan oleh beberapa factor, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang mempegaruhi pendapatan wajib pajak.
2. Masih banyak jumlah wajib pajak yang berstatus NE (NON Efektif)
3. Masih terbatas jangkauan sosialisasi pajak terhadap wajib pajak potensial

4. Perubahan nominal PTKP tahunan 2009 yang mengakibatkan wajib pajak lebih ringan dalam membayar kewajiban perpajaknya.
5. Jumlah pembayaran pajak wajib pajak efektif juga menjadi pertimbangan penerimaan pajak di KPP pratama Palembang seberang ulu, karena seringnya terdapat jumlah SPMKP pada penerimaan pajak yang disebabkan oleh adanya restitusi PPN DAN PPnBM, salah tempat pembayaran jumlah wajib pajak, dan tidak ada pelaporan wajib pajak yang berpindah kediaman atau telah meninggal.
6. Sering kali pelayanan menjadi perhatian yang utama bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pelayanan yang buruk akan membuat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya masalah pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut menyatakan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza (2009) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Penghasilan.

Kepatuhan wajib pajak badan dari hasil analisis secara parsial (uji t) di ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Pengaruh ini secara nyata dapat dilihat dari penyampaian SPT Tahunan

orang pribadi yang dapat menambah atau meningkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

b. Uji t (secara parsial) Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Pengujian hipotesis uji t ini digunakan Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak dan jumlah penerimaan surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. dapat dilihat pada uji statistik t berikut ini.

Tabel IV.8
Hasil pengujian Regrasi Linear Berganda

Coefficients					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-4.132E11	1.898E11		.161
	P Orang Pribadi (X1)	40500148.768	9090150.790	.887	.047
	SPT Tahunan Op(X2)	4.086E8	2.826E8	.350	.221

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan PPh OP dan Badan (Y)

Sumber : hasil pengolahan data. 2014

a. Menentukan formulasi hipotesis

H_0 : X_i tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

H_1 : X_i berpengaruh signifikan terhadap Y

b. Menentukan taraf nyata α dengan table

Dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$, $df (n-k-1) = (5-2-1)$, nilai t table didapat sebesar 4,303.

c. Menurut Kriteria Pengujian

H_0 diterima jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$

H_0 ditolak jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$

d. Menentukan nilai uji statistik

berdasarkan tabel IV.9 didapat t hitung untuk variabel jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan (X_1) adalah sebesar 4.455 dan t hitung untuk variabel Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan (X_2) adalah sebesar 1.757

e. Membuat kesimpulan

Pada variabel jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan (X_1) nilai t hitung $< t$ table ($4.455 < 4,303$) dan $\text{sig } 0,047 > 0,05$, Maka H_1 diterima. Ini berarti jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Pada variabel jumlah penerimaan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Badan (X_2), nilai t hitung $< t$ tabel ($1.757 < 4,303$) dan $\text{sig } 0,221 > 0,05$, maka H_0 diterima. Ini berarti bahwa jumlah surat pemberitahuan (SPT) tahunan badan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan.

Berdasarkan hasil analisis secara parsial uji (t) diperoleh hasil untuk variabel jumlah wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh

signifikan. Jumlah wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan ini disebabkan oleh beberapa faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi disebabkan oleh beberapa factor, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi yang mempegaruhi pendapatan wajib pajak.
2. Masih banyak jumlah wajib pajak yang berstatus NE (NON Efektif)
3. Masih terbatas jangkauan sosialisasi pajak terhadap wajib pajak potensial
4. Perubahan nominal PTKP tahunan 2009 yang mengakibatkan wajib pajak lebih ringan dalam membayar kewajiban perpajaknya.
5. Jumlah pembayaran pajak wajib pajak efektif juga menjadi pertimbangan penerimaan pajak di KPP pratama palembang seberang ulu, karena seringnya terdapat jumlah SPMKP pada penerimaan pajak yang disebabkan ooleh adanya restitusi PPN DAN PPnBM, salah tempat pembayaran jumlah wajib pajak, dan tidak ada pelaporan wajib pajak yang berpindah kediaman atau telah meninggal.
6. Sering kali pelayanan menjadi perhatian yang utama bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pelayanan yang buruk akan membuat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannnya khususnya masalah pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut menyatakan bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza (2009) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Penghasilan.

Kepatuhan wajib pajak badan dari hasil analisis secara parsial (uji t) di ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak badan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. tidak berpengaruh dapat dilihat dari penyampaian SPT Tahunan badan yang tidak menambah atau meningkat penerimaan pajak penghasilan badan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka pada bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan, serta memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

A. SIMPULAN

1. Secara bersamaan (Silmutan)
 - a. Pengaruh jumlah wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel jumlah wajib pajak, (X_1) dan jumlah penerimaan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan badan (Y). hal ini dibuktikan melalui perhitungan uji F dengan hasil bahwa untuk Nilai $F_{hitung} < F_{table}$ ($4.535 < 19,000$) dan $sig\ 0,181 < 0,05$ maka sesuai dengan hipotesis yang di ajukan menyatakan bahwa H_0 diterima yang artinya jumlah wajib pajak orang pribadi dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.
 - b. Pengaruh jumlah wajib pajak Badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan, variabel jumlah wajib pajak, (X_1) dan jumlah penerimaan surat pemberitahuan (SPT)

Tahunan (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan badan (Y). hal ini dibuktikan melalui perhitungan uji F dengan hasil bahwa untuk Nilai F hitung $< F$ table ($4.535 < 19,000$) dan sig $0,181 < 0,05$ maka sesuai dengan hipotesis yang di ajukan menyatakan bahwa H_0 diterima yang artinya jumlah wajib pajak orang pribadi dan surat pemberitahuan (SPT) tahunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Berdasarkan hasil Analisis secara Parsial (uji t)

- a. Pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan, Pada variabel jumlah wajib pajak orang pribadi (X_1) nilai t hitung $< t$ table ($467 < 4,303$) dan sig $0,687 > 0,05$, Maka H_0 diterima. Ini berarti jumlah wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Pada variabel jumlah penerimaan surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi (X_2), nilai t hitung $< t$ tabel ($-1,839 < 4,303$) dan sig $0,207 < 0,05$, maka H_0 diterima. Ini berarti bahwa jumlah surat pemberitahuan (SPT) tahunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- b. Pengaruh jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak Badan terhadap penerimaan pajak penghasilan, Pada variabel jumlah wajib pajak badan (X_1) nilai t hitung $< t$ table ($4.455 > 4,303$) dan sig

$0,047 > 0,05$, Maka H_1 diterima. Ini berarti jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan (Y). Pada variabel jumlah penerimaan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Badan (X_2), nilai t hitung $< t$ tabel ($1,757 < 4,303$) dan $\text{sig } 0,221 < 0,05$, maka H_0 diterima. Ini berarti bahwa jumlah surat pemberitahuan (SPT) tahunan badan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan (Y).

B. SARAN

Saran yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu adalah:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dituntut lebih aktif melakukan sosialisasi peraturan perpajakan dan melaksanakan berbagai program yang dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban baik secara formal maupun material.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dengan memperbaiki sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan yang diberikan supaya masyarakat lebih tertarik lagi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Waskito. 2011. *Mudahnya Menghitung Pajak Penghasilan*. Buku Pintar, Yogyakarta
- Ari bramasto. 2010. pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektivitas system self assessment. (*Majalah ilmiunikom*). (online), Vol.10, No.2, (<http://jurnal.unikom.ac.id/s/data/jurnal/volume-10-2/03-miu-102-ari.pdf/pdf/03-miu-102-ari.pdf>, diakses 11 Mei 2013)
- Anwar Sanusi. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Earli suandi. 2006. *Pajak Edisi Ke 2*. Salemba Empat, Jakarta.
- Herry purwono. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Erlangga, Jakarta
- M. Iqbal Hasan. 2003. *Pokok-Pokok Materi Statistik 2*. Bumi Aksara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mira Nova Ardani, 2010. Pengaruh kebijakan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus di kanwil direktorat jendral pajak jawa timur 1 surabaya), (online). (<http://eprients.undip.ac.id>, di akses 22 september 2013).
- Nan Lin Alih Bahasa W. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen*. BPFE, Yogyakarta.
- Rohcmat Soemitro. 2002. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. PT.Eresco, Jakarta.
- Reza Triyantoro. 2009. pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Jakarta mampang prapatan, (online). (<http://www.library.upnvj.ac.id>, diakses 22 september 2013)
- Widi Widodo, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta, bandung.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan: teori dan kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, bandung.

Soeratno dan Lincolyn Arsyad. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah tahun 2008. *Tentang Perpajakan*. citra umbara, bandung



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135
Telepon (0711) 357077, 315288, 312395 ; Faksimili (0711) 313119

Nomor : S- 346/WPJ.03/BD.05/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Pemberian Izin Riset

20 Nopember 2013

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu
Palembang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 111/G-17/FE-UMP/XI/2013 tanggal 06
Nopember 2013 hal Mohon Bantuan Data atas :

Nama/NPM : Yuyun / 222010297 ✓

dengan ini Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuisioner/penelitian dan atau riset pada **KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang P2 Humas

✓ Fadjar Julianto
NIP 197007161995031001

Tembusan:

1. Saudara/i Yuyun, selaku mahasiswa yang melaksanakan Riset.

Tahun

2008

Sum of JUMLAH Row Labels	Column Labels 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total
Bunga Penagihan PPh			6,057,125										6,057,125
PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN)	648,151,826	566,697,142	663,945,819	633,266,980	976,161,986	729,117,397	702,676,370	602,961,004	656,611,768	107,206,688	41,497,090	283,809,277	6,612,103,347
PPh Gas Alam	1,718,712				135,000	4,388,636	436,364				492,728	493,638	7,665,078
PPh Lainnya Dari Migas			376,500		983,800								1,360,300
PPh Lainnya Dari Minyak Bumi		616,250											616,250
PPh Minyak Bumi		415,000											960,000
PPh Non Migas Lainnya	169,000								545,000				169,000
PPh Pasal 21	10,719,728,731	8,123,056,999	14,616,785,215	9,913,452,701	8,354,033,722	9,217,974,210	8,325,654,453	8,706,283,449	1,365,349,995	722,787,875	942,003,641	1,176,734,793	82,183,845,784
PPh Pasal 22 DN	3,125,878,592	2,320,742,100	2,219,102,241	1,676,660,858	2,318,520,452	2,235,856,185	2,546,289,388	2,675,541,261	935,090,691	934,284,155	528,267,403	916,564,985	22,432,798,111
PPh Pasal 22 Impor	248,640,138	561,872,626	192,723,410	126,074,928	149,729,200	88,965,190	46,739,686	15,184,181	50,653,030	184,955,433	410,977	1,967,856	1,667,516,655
PPh Pasal 23	2,795,916,110	2,217,875,310	2,535,780,616	2,757,235,963	2,186,032,264	1,908,182,125	1,869,825,554	2,096,351,851	602,767,806	577,792,506	331,391,757	614,164,042	20,493,315,904
PPh Pasal 25/29 Badan	165,633,795	185,581,887	858,843,329	175,857,468	161,723,146	191,245,887	180,325,955	185,483,833	102,585,612	59,344,194	66,738,876	65,796,478	2,399,120,460
PPh Pasal 25/29 OP	60,564,117	75,806,978	1,178,763,276	86,373,973	77,691,261	76,459,753	70,184,582	65,011,739	44,989,343	37,241,886	36,647,118	161,891,139	1,971,625,165
PPh Pasal 26	34,196,685	31,811,318	436,839,224	26,157,491	25,585,711	452,353,218	26,457,545	31,783,867	1,877,923				1,067,062,982
PPh BM Dalam Negeri	7,468,803	3,809,536	689,236	1,513,145	270,000	6,127,890	18,519,776	10,632,188		924,610	4,620,000	5,513,919	60,089,103
PPh BM Impor				32,400			18,800						51,200
PPN Dalam Negeri	17,667,087,332	6,880,064,395	6,298,073,261	10,716,922,082	7,332,341,552	8,165,767,619	9,585,048,632	12,375,255,094	4,089,330,406	3,439,390,318	2,957,248,909	5,879,297,286	95,385,826,886
PPN Impor	883,130,511	2,173,989,924	393,580,847	934,091	143,499,218	69,591,264	15,804,186	58,318,835	201,909,120	733,229,388	132,605	2,881,663	4,677,001,652
PPN Lainnya	3,872,725		1,073,819	3,000,000	462,727	7,321,726	19,126,725	2,417,270	940,908		2,084,800		40,300,700
Grand Total	36,362,157,077	23,148,396,590	29,396,576,793	26,117,481,880	21,727,170,039	23,152,951,100	23,407,108,016	26,825,224,572	8,052,651,602	6,797,157,053	4,911,635,904	9,109,075,076	239,007,485,702

Tahun 2010

Sum of JUMLAH Row Labels	Column Labels 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total
BPHTB	708,789,516	613,952,545	553,850,971	363,528,839	541,211,175	529,815,585	529,734,900	457,164,392	363,641,025	396,389,850	448,541,005	453,600,409	5,960,220,212
Bunga Penagihan PPh	596,491										85,146		681,637
PBB Pedesaan	52,333,661												52,333,661
PBB Perkotaan	243,079,574	79,700,041	391,355,208	772,437,873	474,085,541	1,102,402,537	478,826,033	652,461,966	7,300,043,771	493,150,251	51,475,159	108,666,276	12,147,684,230
PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN)	131,178,537	175,068,225	270,087,218	363,086,548	715,534,104	345,783,892	211,637,560	338,345,341	217,916,626	372,465,773	224,888,366	2,116,107,960	5,482,100,150
PPh Gas Alam	41,250				19,785,613						1,950		19,828,813
PPh Non Migas Lainnya											55,446		55,446
PPh Pasal 21	900,553,663	559,822,580	556,718,967	648,019,134	929,218,978	879,644,737	993,228,623	746,888,489	1,123,667,524	1,363,753,190	704,709,539	1,964,549,621	11,370,775,045
PPh Pasal 22 DN	509,723,942	777,766,004	716,340,593	849,010,291	780,190,656	678,350,395	869,695,854	849,520,803	793,831,018	446,055,620	490,891,433	887,237,749	8,648,614,358
PPh Pasal 22 Impor	562,065	42,209	917,997		85,300,000	191,795,364	105,164,235	37,704,955	188,829	23,031,759	656,604	1,049,015	446,413,632
PPh Pasal 23	137,717,899	78,021,913	105,224,787	83,661,954	81,909,564	156,703,197	213,184,532	275,537,973	129,078,739	343,563,135	263,227,146	3,888,651,996	5,756,482,835
PPh Pasal 25/29 Badan	102,379,055	123,248,025	16,310,012,102	1,966,767,227	1,716,790,565	1,685,645,423	1,681,176,721	1,691,585,886	1,684,899,574	1,681,374,093	1,685,066,760	1,688,898,332	32,017,843,763
PPh Pasal 25/29 OP	48,221,281	62,326,272	160,150,660	52,394,491	45,179,556	51,446,821	46,359,381	54,788,839	58,068,283	48,290,233	63,943,795	60,328,478	751,498,090
PPh Pasal 26		10,002,300						10,512,645		11,207,631	31,890,445	123,359,564	186,972,585
PPn BM Dalam Negeri	55,500	69,090			810,000	7,830,000	433,950			102,273		556,814	9,857,627
PPn BM Impor	367,000					1,559,000				28,650			1,954,650
PPN Dalam Negeri	3,865,976,258	1,200,247,415	1,976,435,973	2,148,653,593	1,984,780,498	3,067,240,077	2,090,232,753	2,704,113,485	2,514,730,493	3,138,354,721	3,489,242,904	7,575,783,629	35,755,791,799
PPN Impor					334,000,000	764,028,000	412,889,273	149,907,273		87,448,945	102,273	426,000	1,748,801,764
PPN Lainnya					270,910		387,363		3,105,453		270,909		4,034,635
Grand Total	6,701,576,292	3,680,266,619	21,041,094,476	7,247,559,950	7,709,067,160	9,462,245,028	7,632,951,178	7,968,532,047	14,189,171,335	8,405,216,124	7,455,048,880	18,869,215,843	120,361,944,932

TAHUN_PAJAK

2008

Count of NPWP		Column Labels												
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total	
SPT Tahunan Pasal 21	8	105	519	205	24	13	2	4	4			1	885	
SPT Tahunan PPh Badan	8	85	382	280	23	7	2	6	7	4		1	805	
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	56	806	7403	349	37	9	3	6	7	2	4	11	8693	
Grand Total	72	996	8304	834	84	29	7	16	18	6	4	13	10383	

TAHUN_PAJAK

2007

Count of NPWP	Column Labels													
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total	
SPT Tahunan Pasal 21	19	93	611	46	16	7	6	3	2	3	3	3	812	
SPT Tahunan PPh Badan	19	73	552	45	15	8	9	4	4		4	4	737	
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	97	606	3768	222	22	5	4	1	2	1	6	17	4751	
Grand Total	135	772	4931	313	53	20	19	8	8	4	13	24	6300	

TAHUN_PAJAK

2012

Count of NPWP	Column Labels												
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	Grand Total	
SPT Tahunan Pasal 21										1		1	
SPT Tahunan PPh Badan		6	50	117	558	33	10	8	3	3	6	2	796
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi		135	1634	12345	576	81	21	8	9	6	44	11	14870
Grand Total		141	1684	12462	1134	114	31	16	12	9	51	13	15667

TAHUN_PAJAK

2011

Count of NPWP	Column Labels													
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total	
SPT Tahunan PPh Badan		6	38	162	552	23	14	10	7	5	6	4	6	833
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi		208	2276	13422	686	122	24	45	15	6	8	16	39	16867
Grand Total		214	2314	13584	1238	145	38	55	22	11	14	20	45	17700

TAHUN_PAJAK 2010

Count of NPWP	Column Labels												
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total
SPT Tahunan PPh Badan	11	42	177	516	29	6	11	2	2	6	9	10	821
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	198	1093	12999	287	27	15	11	7	70	92	97	178	15074
Grand Total	209	1135	13176	803	56	21	22	9	72	98	106	188	15895

TAHUN_PAJAK 2009

Count of NPWP	Column Labels												
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total
SPT Tahunan PPh Badan	15	41	283	396	11	9	10	8	1	16	2	11	803
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	183	1086	11197	451	18	59	66	50	23	5	8	8	13154
Grand Total	198	1127	11480	847	29	68	76	58	24	21	10	19	13957

Tahun 2012

Sum of JUMLAH Row Labels	Column Labels 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total
Bunga Penagihan PPh								6,976,148					6,976,148
PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN)	380,064,693	483,744,003	670,953,294	930,164,326	487,998,188	876,675,970	963,093,060	1,132,402,032	907,341,352	1,002,510,201	1,528,920,615	1,615,188,311	10,979,056,045
PPh Gas Alam		238,000						7,000					245,000
PPh Non Migas Lainnya					30,000								30,000
PPh Pasal 21	1,311,288,785	1,112,710,833	1,358,292,612	2,858,679,680	1,501,662,670	1,485,042,288	2,822,020,532	1,578,277,443	1,955,924,883	1,354,565,577	1,640,162,302	2,368,766,880	21,347,394,485
PPh Pasal 22 DN	334,359,548	557,612,209	795,271,973	859,720,705	687,382,360	706,653,544	581,090,473	855,123,457	417,210,891	565,120,102	669,715,692	1,720,359,178	8,749,620,132
PPh Pasal 22 Impor	25,282,033	7,659,000	19,442,399	451,137,107	30,117,174	72,156,277	206,717,498	31,853,437	45,781,656	86,807,373	1,418,086	64,077,207	1,042,449,247
PPh Pasal 23	207,834,746	132,769,367	225,134,813	142,184,906	139,065,383	181,746,320	186,724,601	206,838,397	201,351,528	122,788,399	212,850,150	617,989,343	2,577,277,953
PPh Pasal 25/29 Badan	3,102,893,961	3,112,354,618	5,565,170,899	3,160,481,836	2,610,297,700	2,599,572,533	2,633,101,297	369,466,886	5,101,434,361	2,649,102,119	2,683,023,795	5,136,591,558	38,723,491,363
PPh Pasal 25/29 OP	53,197,717	79,149,938	259,760,011	69,372,735	95,671,233	61,781,666	55,802,847	71,804,423	55,770,609	81,048,361	58,570,522	81,806,179	1,023,736,241
PPh Pasal 26	6,681,922	6,079,105	1,801,328,411	6,240,329		12,646,762	6,575,832	3,807,360	13,109,098	6,756,015	6,903,123	6,981,025	1,877,108,982
PPn BM Dalam Negeri	37,400,134	40,908,285	40,410,840	240,000		322,128					52,750	127,000	119,460,937
PPN Dalam Negeri	4,483,304,135	2,502,848,630	2,805,227,354	2,972,586,599	3,534,642,464	3,272,557,188	3,889,245,520	4,544,914,439	5,587,589,860	6,267,264,936	7,157,539,909	17,003,281,567	64,021,002,601
PPN Impor	91,267,000	30,414,000	14,700,000	1,803,466,000	109,687,000	277,393,000	801,890,000	125,833,000	171,505,594	344,386,000	666,000	209,620,000	3,980,827,594
Grand Total	10,033,574,674	8,066,487,988	13,555,692,206	13,254,274,223	9,196,554,172	9,546,547,676	12,153,237,808	8,920,327,874	14,457,019,832	12,480,349,083	13,959,822,944	28,624,788,248	154,448,676,728

Tahun 2011

Sum of JUMLAH	Column Labels												Grand Total
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
PBB Perkotaan	35,262,584	30,633,071	118,889,527	946,860,679	815,788,822	7,286,262,107	536,158,243	755,220,647	8,460,777,275	185,441,236	121,622,790	116,837,921	19,409,754,902
PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN)	305,148,058	224,144,136	314,617,230	247,282,559	373,071,557	404,343,502	409,224,779	730,257,190	287,047,567	455,526,458	848,216,017	854,658,109	5,453,537,162
PPh Gas Alam							8,000			134,318		26,500	168,818
PPh Pasal 21	652,386,263	732,089,733	1,104,274,386	1,308,088,534	1,248,988,836	928,877,426	1,604,967,474	1,313,262,728	1,010,027,133	1,399,804,871	1,140,395,159	3,372,445,160	15,815,607,703
PPh Pasal 22 DN	701,428,873	1,141,865,663	793,267,346	723,847,243	964,047,631	794,577,523	756,131,664	1,014,757,801	794,903,739	468,416,431	534,124,514	1,138,371,617	9,825,740,045
PPh Pasal 22 Impor	51,781,987	1,042,046	32,348,691	18,826,786	13,675,282	32,035,200	72,001,514	463,017	24,127,500	243,727,045	5,334,571	9,308,452	504,672,091
PPh Pasal 23	297,792,653	105,844,163	287,318,124	137,765,298	306,712,530	371,656,265	292,719,311	338,134,239	394,778,352	270,646,080	244,585,398	712,349,843	3,760,302,256
PPh Pasal 25/29 Badan	1,681,530,385	1,682,094,539	8,426,660,294	2,117,736,914	1,894,168,635	1,899,110,175	2,619,404,868	2,599,193,747	2,591,378,608	3,121,405,304	3,096,500,821	3,101,913,549	34,831,097,839
PPh Pasal 25/29 OP	48,688,754	68,437,236	264,050,176	59,217,434	59,460,130	58,221,736	52,563,523	89,576,281	52,586,042	62,299,280	59,136,714	54,017,006	928,254,312
PPh Pasal 26	299,238,485	5,887,409	13,885,392	5,996,112	6,009,864	270,155,696	174,658,645	5,366,260	5,916,553	5,749,999	144,566,364	9,589,003	947,019,782
PPn BM Dalam Negeri	102,273					35,070,000			254,545		3,434,993	890,000	39,751,811
PPn BM Impor			493,125	59,543		88,720	127,974						769,362
PPN Dalam Negeri	3,958,685,158	1,236,852,164	2,718,321,752	2,418,463,529	2,693,542,603	3,434,367,944	2,996,484,174	3,528,808,911	3,559,298,873	3,499,725,005	4,594,322,848	11,522,272,846	46,161,145,807
PPN Impor	206,860,983	1,290,000	127,984,000	13,780,968	53,928,400	116,617,973	206,470,000	4,532,945	89,547,000	973,702,000	3,395,000	8,247,273	1,806,356,542
PPN Lainnya												9,001,250	9,001,250
Grand Total	8,238,906,456	5,230,180,160	14,202,110,043	7,997,925,599	8,429,394,290	15,631,384,267	9,720,920,169	10,379,573,766	17,270,643,187	10,686,578,027	10,795,635,189	20,909,928,529	139,493,179,682

Tahun 2009

Sum of JUMLAH Row Labels	Column Labels 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total
BPHTB										78,114,875	244,051,000	495,156,475	817,322,350
PBB Perkotaan										81,277,756	67,560,078	225,444,728	374,282,562
PPh Final dan Fiskal Luar Negeri (FLN)	221,072,522	50,358,052	158,008,974	3,847,551,619	216,767,380	98,731,826	232,265,625	177,892,347	149,372,244	335,891,580	309,122,009	797,377,505	6,594,411,683
PPh Pasal 21	675,795,008	659,222,191	954,578,910	907,275,924	926,280,813	838,850,281	902,363,631	729,896,762	1,132,302,763	1,034,250,123	746,309,887	1,369,555,611	10,876,681,904
PPh Pasal 22 DN	736,310,285	713,683,260	592,495,285	556,848,861	464,409,546	476,069,389	562,253,046	712,057,493	621,595,081	524,589,718	661,272,592	1,063,720,777	7,685,305,333
PPh Pasal 22 Impor	1,057,750	371,988	2,120,862	1,230,222	1,332,869	168,950	7,929,648	5,473,566	42,539,633	357,806	13,146,000	458,374	76,187,668
PPh Pasal 23	542,099,738	103,595,202	63,885,278	117,930,709	121,928,647	115,601,327	238,343,042	280,098,853	206,864,603	251,763,258	272,639,790	386,968,743	2,701,719,190
PPh Pasal 25/29 Badan	46,796,271	58,738,399	120,128,379	275,186,229	93,655,695	65,348,603	62,455,983	75,713,267	69,098,845	65,708,643	73,511,163	3,359,650,364	4,365,991,841
PPh Pasal 25/29 OP	55,938,509	169,824,609	189,971,760	47,691,252	51,714,346	42,717,995	45,942,952	48,665,936	43,427,608	62,306,112	48,121,236	131,185,308	937,507,623
PPh Pasal 26						31,207,680					6,279,930	731,250	38,218,860
PPn BM Dalam Negeri		3,310,655		626,000			5,047,682	47,983,407	18,889,991		1,901,758	7,049,356	84,808,849
PPn BM Impor				61,365	1,636,363			14,318				2,761,000	4,473,046
PPN Dalam Negeri	3,908,197,275	1,433,939,258	1,219,972,242	2,412,994,741	1,863,924,798	2,156,219,504	2,235,564,177	2,477,735,881	2,799,125,237	2,234,410,804	3,421,066,902	6,789,967,847	32,953,118,666
PPN Impor			3,276,434	3,610,689	3,010,148		5,644,578	10,242,266	169,985,077	596,273	21,616,000	1,380,000	219,361,465
PPN Lainnya				470,600								1,769,181	2,239,781
Grand Total	6,187,267,358	3,193,043,614	3,304,438,124	8,171,478,211	3,744,660,605	3,824,915,555	4,297,810,364	4,565,774,096	5,253,201,082	4,669,266,948	5,886,598,345	14,633,176,519	67,731,630,821

TAHUN DAFTAR (Multiple Items)

2008

Count of NPWP	Column Labels													
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total	
BADAN	182	158	142	165	174	143	158	150	204	209	257	177	2119	
BENDAHARA	7	3	7	19	15	12	15	8	7	13	9	13	128	
OP	571	510	846	524	437	836	663	906	1605	2297	3927	4620	17742	
Grand Total	760	671	995	708	626	991	836	1064	1816	2519	4193	4810	19989	

TAHUN DAFTAR (Multiple Items)

2007

Count of NPWP	Column Labels												Grand Total
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
BADAN	140	136	127	134	152	128	142	144	194	196	236	166	1895
BENDAHARA	5	2	6	19	15	9	12	7	7	13	9	12	116
OP	480	421	721	315	317	356	528	805	1428	1948	2998	2326	12643
Grand Total	625	559	854	468	484	493	682	956	1629	2157	3243	2504	14654

TAHUN DAFTAR (Multiple Items)

2009

Count of NPWP	Column Labels													
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total	
BADAN		207	169	153	190	185	162	176	162	216	237	272	194	2323
BENDAHARA		12	13	15	30	22	32	23	21	9	17	10	16	220
OP		2160	2741	2115	1539	1124	1807	1282	1429	1977	2832	4321	5052	28379
Grand Total		2379	2923	2283	1759	1331	2001	1481	1612	2202	3086	4603	5262	30922

TAHUN DAFTAR (Multiple Items)

2010

Count of NPWP	Column Labels												
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total
BADAN	248	195	171	204	200	173	187	177	220	248	289	212	2524
BENDAHARA	20	13	17	30	26	33	27	21	9	20	11	16	243
OP	3311	4348	3120	2177	1598	2249	1748	1794	2274	3149	4667	5449	35884
Grand Total	3579	4556	3308	2411	1824	2455	1962	1992	2503	3417	4967	5677	38651

TAHUN DAFTAR (Multiple Items)

2011														
Count of NPWP	Column Labels													
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total	
BADAN	273	222	191	224	215	210	200	189	236	270	311	224	2765	
BENDAHARA	20	21	20	33	26	38	33	23	10	21	11	19	275	
OP	3858	4842	4063	2732	2055	2678	2212	2018	2773	3726	5045	5972	41974	
Grand Total	4151	5085	4274	2989	2296	2926	2445	2230	3019	4017	5367	6215	45014	

TAHUN DAFTAR (Multiple Items)

2012

Count of NPWP	Column Labels												
Row Labels	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Grand Total
BADAN	299	249	229	258	246	246	225	201	254	294	357	250	3108
BENDAHARA	23	23	22	34	28	39	36	23	13	22	11	19	293
OP	4314	5398	4743	3238	2451	3053	2519	2399	3613	4191	5573	6420	47912
Grand Total	4636	5670	4994	3530	2725	3338	2780	2623	3880	4507	5941	6689	51313

UJI ASUMASI KLASIK

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		WP Orang Pribadi dan Badan (X1)	SPT Tahunan OP dan Badan(X2)	Jumlah Penerimaan PPH OP dan Badan (Y)
N		5	5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	36946,00	15183,60	23556376907
	Std. Deviation	12163,784	3846,013	17261011072
Most Extreme Differences	Absolute	,148	,159	,303
	Positive	,124	,136	,255
	Negative	-,148	-,159	-,303
Kolmogorov-Smirnov Z		,331	,355	,678
Asymp. Sig. (2-tailed)		1,000	1,000	,747

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolonearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	WP Orang Pribadi dan Badan (X1)	,009	114,213
	SPT Tahunan OP dan Badan(X2)	,009	114,213

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan PPh OP dan Badan (Y)

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

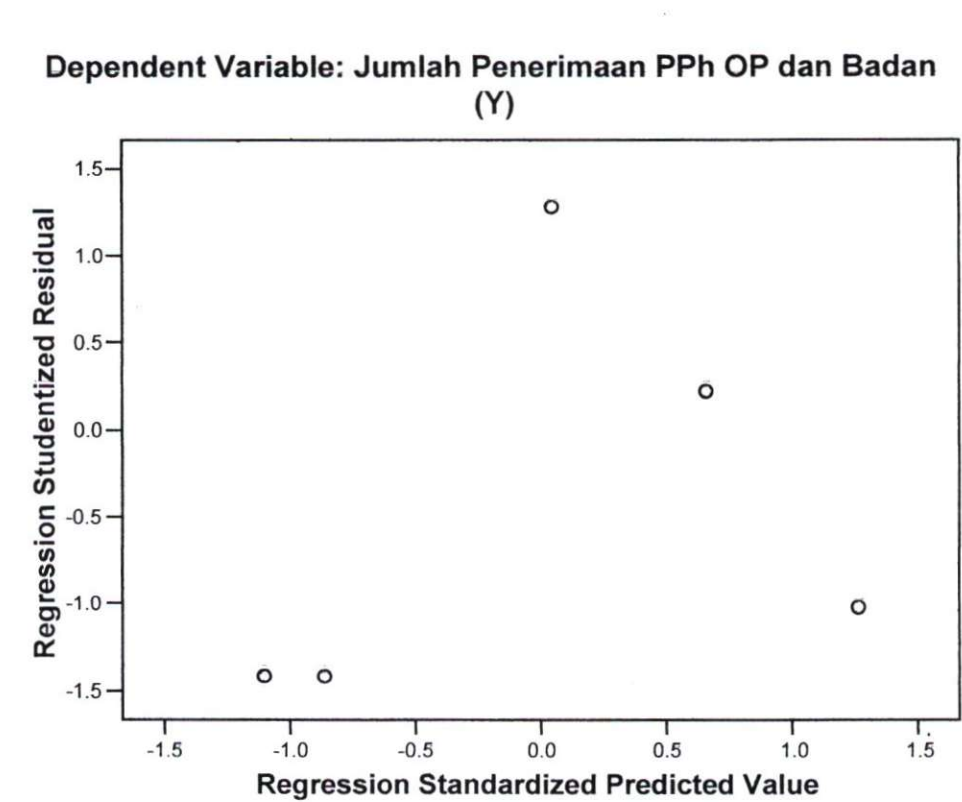
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	,951 ^a	,905	,809	7535766047	2,233

a. Predictors: (Constant), SPT Tahunan OP dan Badan(X2), WP Orang Pribadi dan Badan (X1)

b. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan PPh OP dan Badan (Y)

Uji Heteroskedasitas

Scatterplot



Uji Regresi Linear Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,951 ^a	,905	,809	7535766047

- a. Predictors: (Constant), SPT Tahunan OP dan Badan(X2), WP Orang Pribadi dan Badan (X1)
- b. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan PPh OP dan Badan (Y)


```
REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2
/SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID)
/RESIDUALS DURBIN NORMPROB(ZRESID) .
```

Regression

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SPT, Wajib Pajak	.	Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.905 ^a	.819	.639	2.91464810E8	2.518

a. Predictors: (Constant), SPT, Wajib Pajak
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.705E17	2	3.852E17	4.535	.181 ^a
	Residual	1.699E17	2	8.495E16		
	Total	9.404E17	4			

a. Predictors: (Constant), SPT, Wajib Pajak
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	3.173E9	7.181E8
	Wajib Pajak	119.989	257.181
	SPT	-1793.876	975.340

Coefficients^a

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)		4.419	.048			
	Wajib Pajak	.292	.467	.687	-.717	.313	.140
	SPT	-1.150	-1.839	.207	-.894	-.793	-.553

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	6.5121363E8	1.8267706E9	1.1225243E9	4.38879350E8	5
Residual	-2.16647120E8	2.77040704E8	.00000022	2.06096744E8	5
Std. Predicted Value	-1.074	1.605	.000	1.000	5
Std. Residual	-.743	.951	.000	.707	5

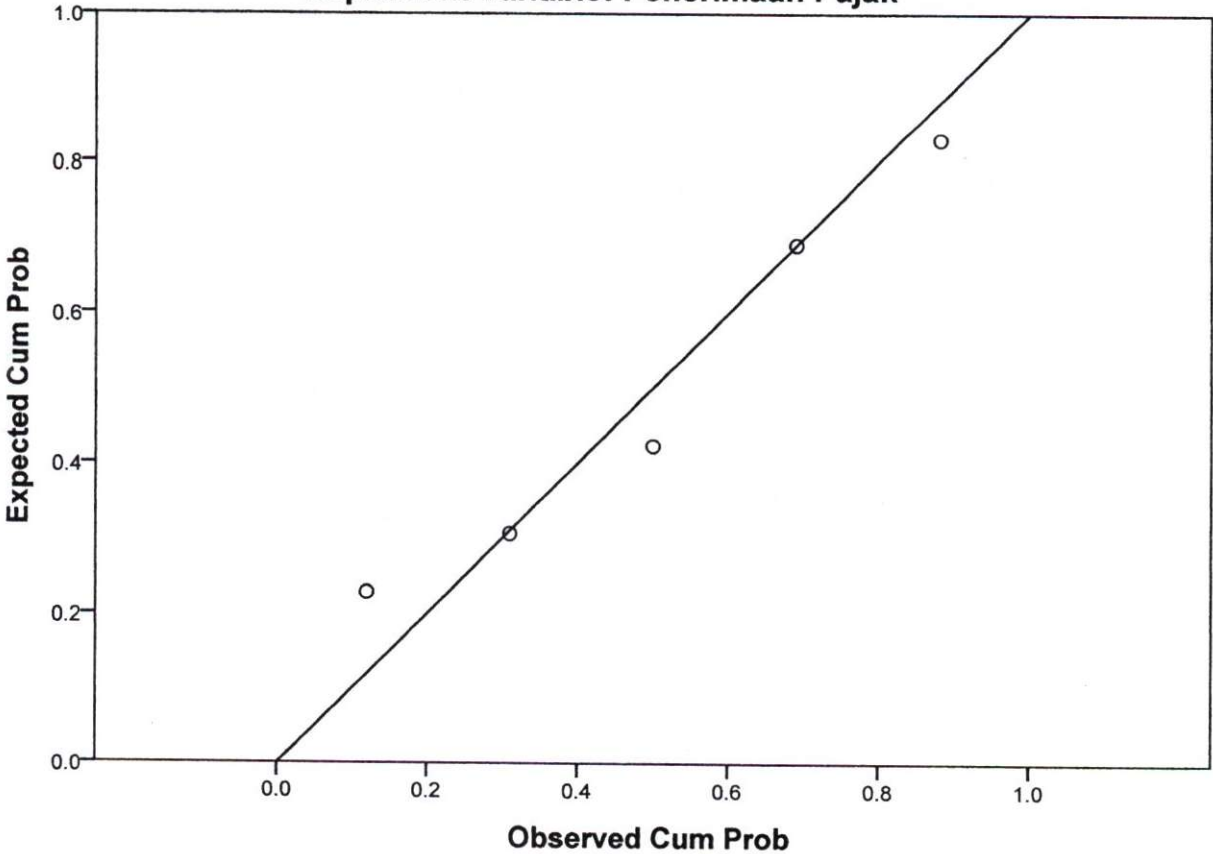
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Charts

$3.173 + 119.989x - 1793.876y$

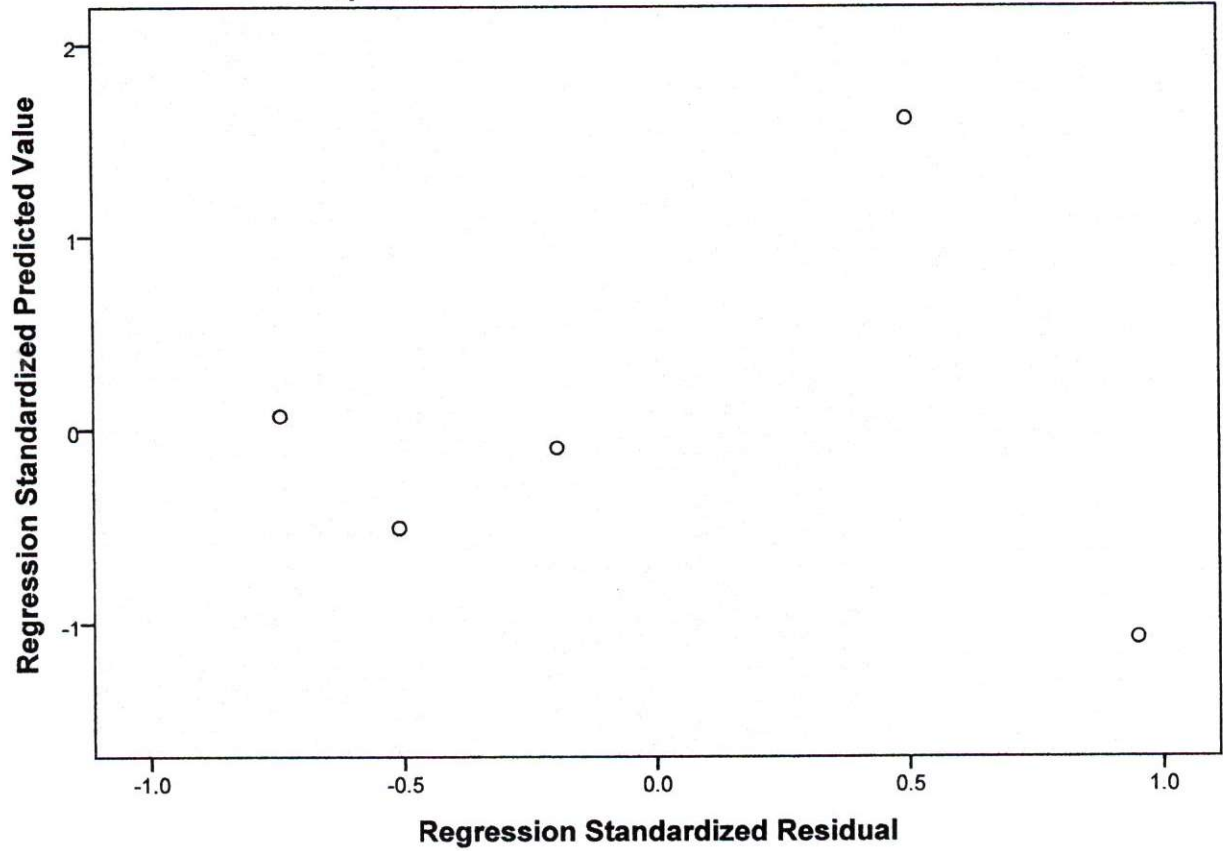
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan Pajak



Scatterplot

Dependent Variable: Penerimaan Pajak



REGRESSION

```

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2
/SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID)
/RESIDUALS DURBIN NORMPROB(ZRESID) .

```

REGRESSION

```

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2
/SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID)
/RESIDUALS DURBIN NORMPROB(ZRESID) .

```

Regression

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SPT, Wajib Pajak	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.960 ^a	.921	.842	7.00442554E9	3.510

a. Predictors: (Constant), SPT, Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.141E21	2	5.703E20	11.624	.079 ^a
	Residual	9.812E19	2	4.906E19		
	Total	1.239E21	4			

a. Predictors: (Constant), SPT, Wajib Pajak
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-4.132E11	1.898E11
	Wajib Pajak	40500148.768	9090150.790
	SPT	4.086E8	2.125E8

2.826 2,826E8

Coefficients^a

Model		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)		-2.177	.161			
	Wajib Pajak	.887	4.455	.047	.894	.953	.887
	SPT	.350	1.757	.221	.367	.779	.350

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Residuals Statistics^a

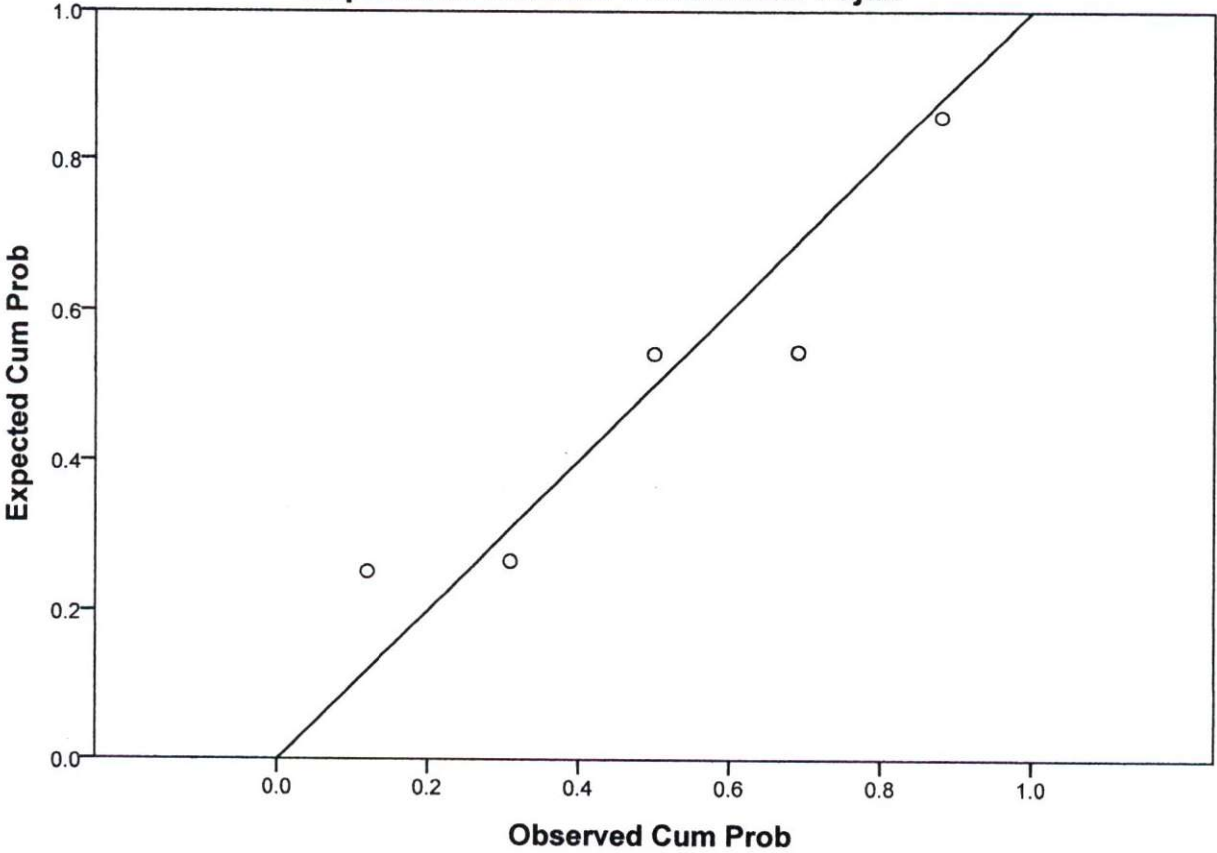
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.5940294E9	3.9198999E10	2.2467509E10	1.6886424E10	5
Residual	-4.67279155E9	7.48304128E9	.00006390	4.95287680E9	5
Std. Predicted Value	-1.236	.991	.000	1.000	5
Std. Residual	-.667	1.068	.000	.707	5

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Charts

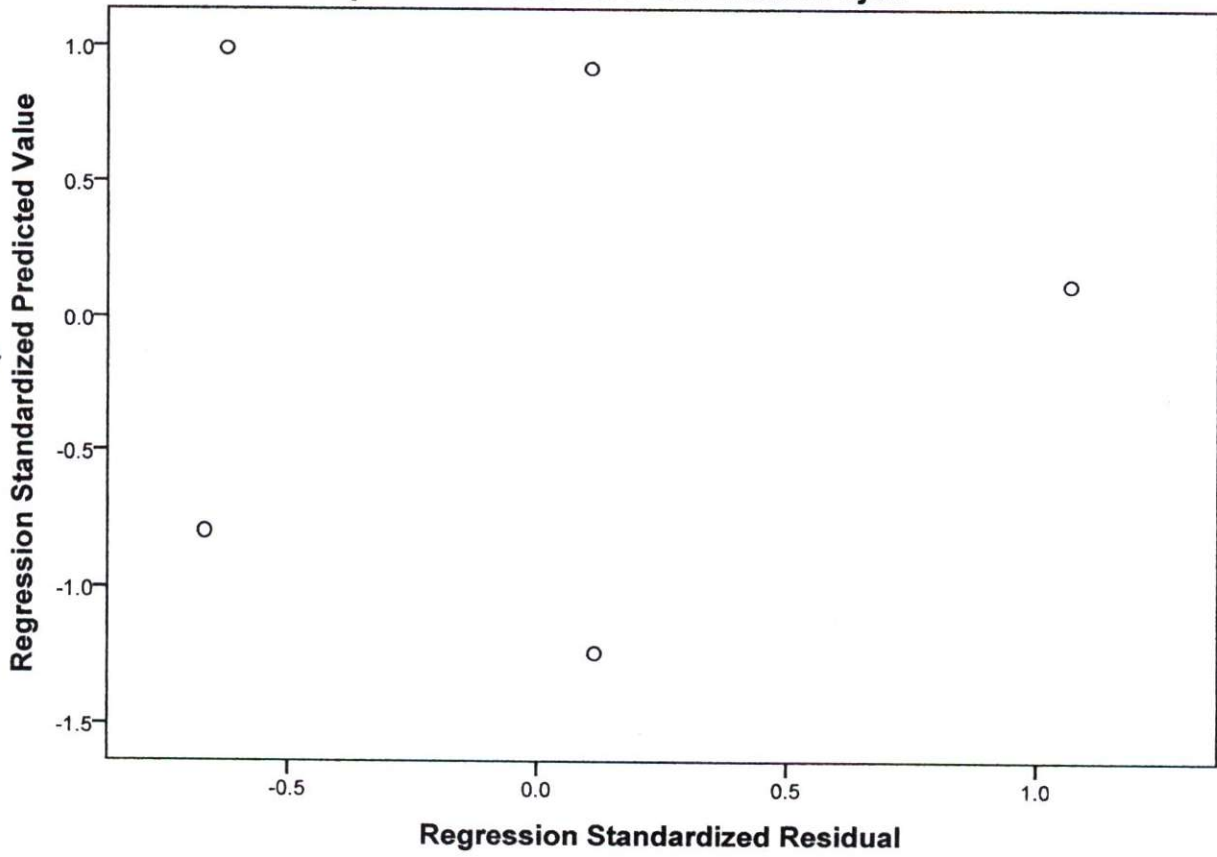
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Penerimaan Pajak



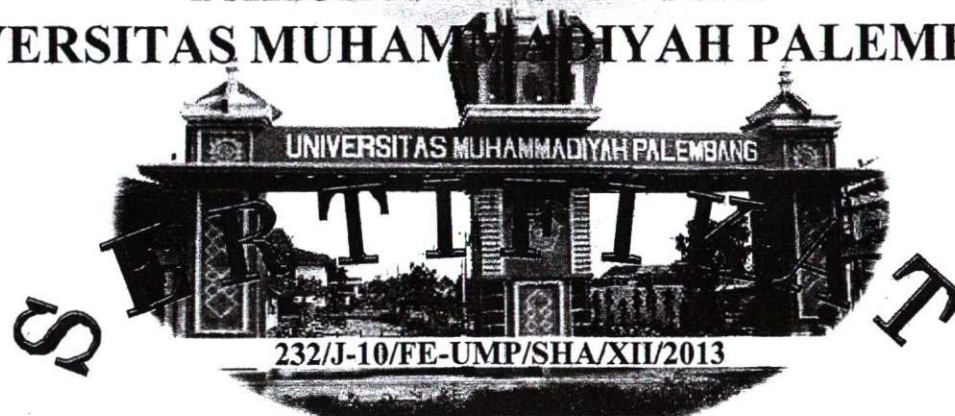
Scatterplot

Dependent Variable: Penerimaan Pajak





FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : YUYUN
NIM : 222010297
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan **LULUS** Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 16 Desember 2013

an. Dekan

Wakil Dekan IV

Unggul dan Islami



Mrs. Antoni, M.H.I.

BIODATA PENULIS

Nama : Yuyun
NIM : 22.2010. 297
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Megang 14- 01 -1992
Alamat : Jl. Banten, Plaju, Palembang

Nama Orang Tua :
Ayah : Bastomi
Ibu : Ningsi

Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Temuan Jaya Blok A, kec.Muara Kelinggi, Kab. Musi Rawas.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Yuyun

PEMBIMBING

NIM : 22 2010 297

KETUA : Hasyim, H, S.E., M.Si

PROGRAM STUDI : Akuntansi

ANGGOTA :

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (ORANG PRIBADI DAN BADAN) DI KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	5-03-2014	BAB 1 perbaikan			
2	6-03-2014	BAB 2 Perbaikan			
3	12-03-2014	BAB 3 Perbaikan			
4	13-03-2014	BAB 4 dan 5 perbaikan.			
5	17-03-2014	BAB 4 dan 5 perbaikan			
6	18-03-2014	BAB 4 dan 5 ACL.			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi

Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)
JURUSAN AKUNTANSI (S1)
MANAJEMEN PEMASARAN (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No. 3619/D/T/K-II/2010
No. 3620/D/T/K-II/2010
No. 3377/D/T/K-II/2009

AKREDITASI

No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 (B)
No. 044/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
No. 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

i / Tanggal : Selasa, 08 April 2014
ktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
na : Yuyun
A : 22 2010 297
gram Studi : Akuntansi
ta Kuliah Pokok : Perpajakan
ul Skripsi : PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN
BADAN DI PP KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
	Hasyim. H, S.E., M.Si	Pembimbing	2 - 5 - 2014	
	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	2 - 5 - 2014	
	Hasyim. H, S.E., M.Si	Penguji I	2 - 5 - 2014	
	M. Fahmi, S.E., M.Si	Penguji II	22/4/2014	

Palembang, 22 April 2014

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, SE, Ak, M.Si

NIDN/NBM: 0228115802/1021960